

## PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh:

**Devi Triana<sup>1</sup>**

**Andini Maulidya<sup>2</sup>**

**Refani Nafi Sara<sup>3</sup>**

**Musleh<sup>4</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: [220721100003@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100003@student.trunojoyo.ac.id)

***Abstract.** Economic growth reflects the positive effects of government policies especially in the economic aspect. The Islamic finance industry is faced with several challenges, such as overcoming the difference between form and substance, dealing with social finance and value-based ethics, and strengthening public trust. These challenges can be overcome by basing Islamic finance on the perspective of Islamic monetary economics. This research uses descriptive quantitative methods and relies on secondary data derived from journals, articles, and various books that discuss Islamic monetary policy in the Indonesian economic system. Monetary policy aims to achieve and maintain currency stability. This research focuses on analyzing the literature on conventional monetary policy and Islamic monetary policy. Nonetheless, monetary policy based on an Islamic perspective has not been fully implemented in the Indonesian economic system, as stipulated in Law No. 6/2009 Article 7. The purpose of this journal is to explore monetary policy in an Islamic perspective, as there are fundamental differences between conventional monetary policy and monetary policy in an Islamic economic perspective.*

***Keywords:** Islamic Monetary Economics, Economic Policy, Indonesian Economy.*

# **PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA**

**Abstrak.** Pertumbuhan ekonomi mencerminkan efek positif dari kebijakan pemerintah terutama dalam aspek ekonomi. Industri keuangan syariah dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti mengatasi perbedaan antara bentuk dan substansi, menghadapi keuangan sosial dan etika berbasis nilai, serta memperkuat kepercayaan publik. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan mendasarkan keuangan Islam pada perspektif ekonomi moneter Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan mengandalkan data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel, serta berbagai buku yang membahas tentang kebijakan moneter Islam pada sistem ekonomi Indonesia. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Penelitian ini berfokus pada analisis literatur tentang kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam. Meskipun demikian, kebijakan moneter berdasarkan perspektif Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem ekonomi Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2009 Pasal 7. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi kebijakan moneter dalam perspektif Islam, karena terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Ekonomi Moneter Islam, Kebijakan Ekonomi, Perekonomian Indonesia.

## **LATAR BELAKANG**

Kebijakan moneter merupakan alat yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol variabel-variabel keuangan seperti suku bunga dan jumlah uang yang beredar, dengan tujuan mempertahankan stabilitas nilai uang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal. Stabilitas nilai uang ini penting karena berdampak pada stabilitas harga yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi yang merata, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter menjadi kunci dalam mengendalikan perekonomian nasional, namun pandangan terhadap kebijakan moneter dapat berbeda-beda tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi konvensional dan Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait kebijakan moneter. Sistem ekonomi moneter Islam, yang memiliki tujuan utama mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, mengarah pada harmonisasi sektor moneter dengan sektor perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan aktivitas

pembiayaan oleh bank syariah akan berdampak pada keseimbangan perekonomian yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, perkembangan sistem keuangan syariah terus berkembang pesat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan instrumen moneter syariah, peningkatan kinerja, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Pada Juli 2021, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 504 triliun, dengan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 405 triliun. Meskipun di tengah pandemi, aset keuangan syariah di Indonesia pada Desember 2020 mencapai Rp 1.802,86 triliun atau USD 127,82 miliar, dengan 65,73% diantaranya dikuasai oleh 12 bank umum syariah. Jumlah rekening bank syariah dan rekening pembiayaan juga mengalami peningkatan yang signifikan<sup>1</sup>.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melibatkan beberapa jalur, termasuk suku bunga, kredit, harga aset, dan nilai tukar. Indonesia menjalankan mekanisme ini dengan menerapkan sistem keuangan ganda, yaitu sistem konvensional dan Islam, seiring dengan prinsip Islam sebagai panduan bagi umat Muslim dalam beraktivitas ekonomi. Kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang dirancang untuk memengaruhi variabel finansial seperti suku bunga dan penawaran uang, dengan tujuan utama mempertahankan stabilitas nilai uang baik dari faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang ini mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi yang merata, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter Islam lebih fokus pada pemeliharaan sumber daya ekonomi, yang menjadi inti dari ekonomi Islam dalam semua bentuk kebijakan dan aturan yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada prinsip Alquran dan Hadis, yang menjadikan syariah Islam sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Instrumen moneter seperti Pasar Uang Antar-Bank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga membantu dalam menjaga likuiditas perbankan syariah. Dengan semakin kuatnya sistem keuangan syariah, akan meningkatkan porsi

---

<sup>1</sup>Al-Arif, N. R. (2010). Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis. Bandung: Alfabeta.

# **PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA**

pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, yang pada gilirannya akan berdampak pada produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Peningkatan produktivitas masyarakat juga akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan domestik dan meningkatkan kemungkinan untuk melakukan ekspor, yang pada akhirnya akan meningkatkan sumber pendapatan negara dari devisa yang dihasilkan, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan moneter Islam terhadap perekonomian Indonesia, dengan manfaat secara teoritis untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang ekonomi Islam<sup>2</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, disebut dengan penelitian menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran mengenai penerapan ekonomi makro Islam dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu menyajikan berupa gambaran lengkap mengenai adanya permasalahan sosial guna untuk eksplorasi dan mengklasifikasikan tentang persoalan sosial yang terjadi. Penelitian ini menggunakan fakta empiris yang terdapat di dasarkan pada bahan bacaan dengan pola penelitian serupa.

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini menggunakan populasi yaitu Instrumen moneter seperti Pasar Uang Antar-Bank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Adapun sampel dari penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), serta bahan pustaka yang relevan.

### **Sampling**

Dalam konteks judul penelitian tentang penerapan kebijakan ekonomi moneter Islam dalam perekonomian Indonesia, beberapa metode sampling yang mungkin digunakan yaitu, stratified random berupa populasi diidentifikasi berdasarkan strata-strata yang relevan, misalnya berdasarkan wilayah geografis, jenis industri, atau ukuran

---

<sup>2</sup>Ayuniyyah, Q., Achsani, N. A., & Ascarya. (2010). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam*, 6-17

perusahaan. Kemudian, sampel diambil secara acak dari setiap strata untuk memastikan representativitas. Cluster sampling berupa populasi diidentifikasi dalam kelompok-kelompok atau cluster, misalnya berdasarkan provinsi atau kota. Kemudian, beberapa cluster dipilih secara acak dan semua unit dalam cluster tersebut diambil sebagai sampel. *Purposive sampling* berupa sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian, misalnya pemilihan responden yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus dalam ekonomi moneter Islam di Indonesia<sup>3</sup>.

### **Analisis Data**

Analisis data yang di gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan studi literature yang sudah dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah baik terkait Kebijakan Moneter Islam Jurnal- jurnal tersebut diperoleh dengan mengakses secara online dari jurnal yang telah dipublikasikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter merupakan salah satu peran negara dalam mengatur dan mengambil tindakan terkait keuangan negara. Secara umum, kebijakan moneter juga dikenal sebagai instrumen pengelolaan uang, yang melibatkan pengaturan permintaan dan penawaran mata uang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Secara spesifik, kebijakan moneter merupakan langkah besar yang diambil pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan penciptaan uang. Melalui langkah ini, pemerintah dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar, investasi, permintaan agregat, dan akhirnya tingkat harga, sehingga stabilitas ekonomi dapat dipertahankan. Dalam konteks Islam, tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas mata uang guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Transmisi kebijakan moneter mencakup interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter, perbankan, lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sektor riil, yang terjadi melalui dua tahapan proses perputaran uang<sup>4</sup>.

### **Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam**

---

<sup>3</sup>Hughes, R. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Praktiknya. *Journal of Chemical Information and Modelling*.

<sup>4</sup>Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam. Syariah.

## **PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA**

Kebijakan moneter Islam harus tidak mengandung unsur riba dan bunga bank, yang dalam Islam diharamkan dengan tegas. Dengan penghapusan bunga bank ini, sistem manajemen moneter yang menjadi instrumen utama dalam ekonomi kapitalis menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Prinsip-prinsip lain dalam kebijakan moneter yang sehat termasuk pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dalam kerangka koordinasi dengan kebijakan makro lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat, seperti kejelasan tujuan, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas. Mengenai ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga, sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskonto<sup>5</sup>.

Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter. Beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol uang beredar termasuk penghapusan sistem bunga tidak menghambat kontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Kebijakan moneter merupakan usaha untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha ini dilakukan untuk mencapai stabilitas harga dan inflasi serta peningkatan output yang seimbang. Hampir semua sektor ekonomi terkait, sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor riil. Keselarasan antara sektor moneter akan mempengaruhi sektor perekonomian secara agregat. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan mempengaruhi keseimbangan perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi<sup>6</sup>.

Pertumbuhan sistem keuangan syariah di Indonesia telah semakin berkembang, terutama terlihat dari peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Meskipun demikian, perkembangan bank syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan ekosistem keuangan yang cepat karena perubahan teknologi dan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap produk dan layanan yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RPS2SI) 2020-2025 sebagai langkah strategis untuk mengarahkan

---

<sup>5</sup>Manan, A. (2012). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.

<sup>6</sup>OJK. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020. Otoritas Jasa Keuangan

pengembangan perbankan syariah Indonesia serta mendorong akselerasi pengembangan syariah.

### **Aplikasi Moneter Islam Di Indonesia**

Mengenai menjalankan perannya terhadap bank-bank berdasarkan prinsip syariah, bank sentral memiliki instrumen-instrumen sebagai berikut: Giro wajib minimum atau *statutory reserve requirement* adalah jumlah minimum simpanan yang harus dimiliki bank umum dalam bentuk giro pada bank sentral, yang ditetapkan sebagai persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini mencakup giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya dalam mata uang Rupiah, tetapi tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari bank sentral atau bank perkreditan rakyat (BPR). Dana pihak ketiga dalam mata uang asing meliputi giro wadiah, deposito investasi, dan kewajiban lainnya. Selain itu, terdapat sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, yang merupakan instrumen yang digunakan oleh bank syariah yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, serta sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank syariah yang kekurangan dana. Ada juga sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), yang merupakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dan digunakan dalam operasi moneter bank sentral<sup>7</sup>.

Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk memastikan pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencakup pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang, dalam kerangka harga yang stabil dan sasaran ekonomi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan ekspansi moneter yang tepat, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menciptakan kesejahteraan merata bagi masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini, tidak hanya reformasi ekonomi dan masyarakat yang sejalan dengan prinsip syariah Islam diperlukan, tetapi juga peran positif dari pemerintah dan semua kebijakan negara, termasuk fiskal, moneter, dan pendapatan, harus sejalan dan seirama. Praktik-praktik yang bersifat monopoli harus dihilangkan, dan upaya

---

<sup>7</sup>Purwanto, H. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Syariati: Jurnal Studi al-Qur'an Dan Hukum*.

## **PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA**

harus dilakukan untuk mendorong semua faktor yang mampu meningkatkan produksi barang dan jasa<sup>8</sup>.

### **Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional**

Fokus utama dalam pembahasan kebijakan moneter adalah apakah kebijakan tersebut, khususnya melalui mekanisme transmisi, berdampak positif terhadap sektor riil ekonomi. Jika kebijakan moneter tidak langsung memengaruhi sektor riil, maka ekonomi dapat terjebak dalam lingkaran yang tidak menguntungkan. Mekanisme transmisi merujuk pada jalur atau cara di mana kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi. Pendukung pendekatan moneter berpendapat bahwa uang memiliki peran penting dalam mempengaruhi output. Namun, pendapat Keynesian menyatakan bahwa faktor-faktor lain, seperti pengeluaran pemerintah, juga memengaruhi output riil. Sebagian besar ekonomi moneter dan pembuat kebijakan kini setuju bahwa kebijakan moneter memengaruhi sektor riil, terutama dalam jangka pendek, dengan penekanan pada saluran kredit sebagai mekanisme transmisi utama<sup>9</sup>.

Transmisi kebijakan moneter melibatkan interaksi antara bank sentral, perbankan, lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sektor riil. Interaksi ini terjadi melalui dua tahap proses perputaran uang. Tahap pertama adalah interaksi antara bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya dalam transaksi pasar keuangan. Tahap kedua adalah interaksi yang terkait dengan fungsi intermediasi antara industri perbankan, lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan di sektor riil<sup>10</sup>.

### **Kebijakan Moneter Menurut Pandangan M. Umar Chapra**

Pemikiran M. Umar Chapra mengenai instrumen kebijakan moneter dalam perekonomian dapat menjadi topik yang penting untuk dipertimbangkan, dikaji, dan bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Penerapan pemikiran Chapra ini di Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam konteks dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dengan tujuan menyediakan alternatif layanan perbankan yang lebih lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah dan

---

<sup>8</sup>Muhammad. (2002). Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>9</sup>Mannan, M. A. (1993). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

<sup>10</sup>Sugianto, Harmain, H., & Harahap, N. (2012). Mekanisme Trasmisi Kebijakan Moneter Syariah. \*Human Falah\*, 50-74.

konvensional bekerja secara sinergis untuk mendukung mobilisasi dana masyarakat yang lebih luas, meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional<sup>11</sup>.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang berbasis bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menekankan aspek keadilan, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan, dan menghindari spekulasi dalam transaksi keuangan. Dengan menyediakan produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. M. Umar Chapra meyakini bahwa sebuah sistem moneter yang adil hanya dapat terwujud melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan hal ini dapat dieksplorasi dan diimplementasikan lebih lanjut, terutama di Indonesia.

Adapun implementasi moneter Indonesia menurut pandangan M. Umer Chapra yaitu:<sup>12</sup>

<p>Pengembangan sistem perbankan Syariah Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam alternative jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan Syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilitas dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.</p>	<p>Dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, jadi kebijakan yang harus ditempuh yaitu yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama</p>	<p>Sejak fase ke I pada tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN,</p>	<p>Indikator adalah variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Ada dua pilihan variabel yang dapat digunakan, yaitu tingkat suku bunga (interest rate) dan jumlah uang beredar (monetary aggregate).</p>
---	--	---	--

<sup>11</sup>Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

<sup>12</sup>Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*.

## PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

		<p>dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan bank yang memiliki otoritas moneter, lebih menaruh perhatian dan lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah tersebut</p>
--	--	---

Sumber : Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Labuhanbatu

### **Penerapan Kebijakan Ekonomi Moneter Islam dalam Perekonomian Indonesia.**

Peran pemerintah memiliki dampak besar dalam perekonomian, terutama dalam usahanya menciptakan distribusi pendapatan yang merata dan adil. Pemerintah terlibat dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, mencapai kesejahteraan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir yang kaya. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus menerapkan aspek-aspek Islam dalam kehidupan dan ekonomi, melalui kebijakan positif dan tindakan tegas. Dalam sektor ekonomi, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, menciptakan lapangan kerja, mempermudah akses ke sumber daya ekonomi, dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam penetapan harga dan pembayaran transfer untuk memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata<sup>13</sup>.

Penerapan kebijakan ekonomi yang cermat oleh pemerintah diperlukan dalam konteks ini, dengan kebijakan fiskal dan moneter sebagai dua kebijakan utama. Kebijakan

<sup>13</sup> Daniar. (2016). Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa. \*Falsh: Jurnal Ekonomi Islam\*, 90-102

moneter, khususnya, mencakup penggunaan bank sentral sebagai alat untuk mempengaruhi pemasukan, kesempatan kerja, dan tingkat harga, yang dikenal sebagai kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan perekonomian makro agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan dengan mengubah jumlah nilai mata uang yang beredar. Segala tindakan pemerintah bertujuan untuk memengaruhi perekonomian melalui peningkatan atau pengurangan jumlah uang yang beredar, yang merupakan dasar dari kebijakan moneter<sup>14</sup>.

Kebijakan moneter, bagian dari langkah-langkah pemerintah untuk mengatur jumlah nilai tukar uang yang beredar, juga membantu menjaga stabilitas perekonomian. Selain itu, kebijakan moneter penting untuk mengatasi kesalahpahaman mengenai masalah uang, yang sering menjadi penyebab krisis ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga stabilitas nilai tukar uang, meningkatkan produksi, dan mendukung pembangunan ekonomi. Mengenai konteks ekonomi Islam, instrumen kebijakan moneter harus sesuai dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan bunga (riba) dalam transaksi. Beberapa instrumen konvensional masih dapat digunakan, seperti persyaratan cadangan, plafon kredit, dan distribusi pembiayaan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Kebijakan moneter juga berperan penting dalam mengendalikan inflasi, yang memiliki dampak signifikan pada perekonomian. Pengendalian inflasi dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan nilai tukar mata uang, dan menetapkan target inflasi dalam jangka pendek dan menengah<sup>15</sup>.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter, yang mencakup pengendalian jumlah uang beredar atau suku bunga, untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai mata uang, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pasal 7. Kebijakan

---

<sup>14</sup>Asnuri, W. (2015). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*

<sup>15</sup>Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. *Justica Islamica*, 57-8

## **PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA**

moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah pemahaman bahwa segala kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan bahwa kekayaan yang dimiliki manusia adalah izin dari Allah. Oleh karena itu, orang yang lebih beruntung memiliki kewajiban untuk membantu yang kurang beruntung, kekayaan tidak boleh ditimbun, dan harus diputar untuk kepentingan bersama. Tujuan lainnya adalah menghilangkan jurang kesenjangan ekonomi dan konflik sosial, serta menetapkan kewajiban yang wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk mereka yang kurang mampu. Instrumen keuangan moneter syariah didasarkan pada hukum syariah Islam. Contoh penerapan kebijakan moneter Islam dapat ditemukan di negara Indonesia. Di ekonomi konvensional, uang dianggap sama dengan komoditasnya dan bunga dianggap sebagai harga dari uang tersebut, yang menyebabkan terjadinya dikotomi antara sektor riil dan sektor moneter. Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan moneter, seperti melanjutkan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat strategi operasi moneter, mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, mendorong UMKM, dan memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Penelitian ini memberikan saran bahwa implementasi kebijakan moneter Islam sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendukung keadilan sosial.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam. \*Syariah\*.
- Al-Arif, N. R. (2010). Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis. Bandung: Alfabeta.
- Asnuri, W. (2015). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. \*Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics\*.
- Ayuniyyah, Q., Achsani, N. A., & Ascarya. (2010). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional. \*Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam\*, 6-17.
- Daniar. (2016). Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa. \*Falah: Jurnal Ekonomi Islam\*, 90-102.

- Hughes, R. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Praktiknya. \*Journal of Chemical Information and Modelling\*.
- Karim, A. A. (2001). Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. \*Jurnal Ekonomi Modernisasi\*
- Manan, A. (2012). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Mannan, M. A. (1993). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad. (2002). Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami. Jakarta: Salemba Empat.
- OJK. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020. Otoritas Jasa Keuangan.
- Purwanto, H. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah. \*Syariati: Jurnal Studi al-Qur'an Dan Hukum\*.
- Sugianto, Harmain, H., & Harahap, N. (2012). Mekanisme Trasmisi Kebijakan Moneter Syariah. \*Human Falah\*, 50-74.
- UU No. 3 Tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. \*Justica Islamica\*, 57-80